



Rencana Strategis 2025—2029

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Anduonohu, Kendari 93231
Telepon: (0401) 3135258; Ponsel: 081342520567
Laman: balaibahasasultra.kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 1434/I5.19/PR.05.00/2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025—2029**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Balai Bahasa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5889/I/BS.01.02/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025—2029.
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2025—2029, yang merupakan dokumen perencanaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan pedoman Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- Ketiga : Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2025—2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Keempat : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2025—2029 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; atau adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 Oktober 2025



Kepala Balai Bahasa
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Dewi Pridayanti, S.Sos., M.Adm.S.D.A.
NIP 197909132005012002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun sebelumnya (periode 2020—2024) agar lebih responsif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan.

Melalui empat program prioritas yang tertuang dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi aktif dalam mendukung program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029 ini menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional lebih terpadu dan terarah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kendari, 30 Oktober 2025

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Sulawesi Tenggara



Dewi Pridayanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	4
1.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2020—2024	4
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
1.2.1. Kekuatan	9
1.2.2. Kelemahan	10
1.2.3. Peluang	10
1.2.4. Tantangan	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	14
2.1 Visi	14
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan	15
2.3.1. Tujuan Strategis Badan Bahasa	16
2.3.2. Tujuan Strategis Balai Bahasa Sultra	16
2.4 Sasaran	18
2.4.1. Sasaran Strategis Badan Bahasa	18
2.4.2. Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Sultra	20
2.5 Manajemen Risiko	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	25
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen	27
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Bahasa	29
3.3.1. Arah Kebijakan	29
3.3.2. Strategi Pelaksanaan Program	38

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Sultra	41
3.4.1 Arah Kebijakan	41
3.4.2. Strategi Pelaksanaan Program	44
3.5 Kerangka Regulasi	45
3.6 Kerangka Kelembagaan	47
3.6.1. Struktur Organisasi	47
3.6.2. Sumber Daya Manusia	48
3.6.3. Reformasi Birokrasi	49
3.6.4. Sarana dan Prasarana	51
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
4.1 Target Kinerja	53
4.2 Kerangka Pendanaan	54
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki kecakapan literasi yang tinggi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sedangkan bahasa daerah merupakan identitas budaya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi penerus. Sejalan dengan itu, sastra berperan sebagai media pembentukan karakter, penguatan literasi, dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan kebahasaan dan kesastraan diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu "Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra." Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Peran tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan program peningkatan kecakapan literasi, pemertabatan bahasa Indonesia, perlindungan bahasa dan sastra daerah, pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan, fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan dukungan manajemen yang efektif dan akuntabel.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kekayaan bahasa daerah yang tinggi serta keragaman budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Bahasa daerah dan berbagai varietas bahasa lainnya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan ilmiah. Di sisi lain, sebagian bahasa daerah tersebut menghadapi tantangan berupa berkurangnya jumlah penutur muda, terbatasnya penggunaan dalam ranah pendidikan dan keluarga, dan semakin kuatnya pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menuntut upaya perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat.

Selain pelestarian bahasa daerah, pembangunan kebahasaan di Sulawesi Tenggara juga dihadapkan pada tantangan peningkatan kompetensi literasi masyarakat. Hasil Asesmen Nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca peserta didik masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menyebabkan akses terhadap bahan bacaan bermutu, layanan literasi, dan pembinaan kebahasaan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, peningkatan kecakapan literasi melalui penyediaan dan pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra, produk penerjemahan, penguatan kapasitas pendidik, dan pelibatan komunitas literasi menjadi salah satu fokus pembangunan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam bidang pemertabatan bahasa Indonesia, masih dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang belum memenuhi kaidah pada dokumen resmi, ruang publik, media informasi, dan layanan publik. Kondisi tersebut memerlukan penguatan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia melalui pengawasan, pendampingan, fasilitasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), serta peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bidang pengembangan bahasa dan sastra, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar berupa kekayaan kosakata daerah, sastra lisan, naskah tradisional, tradisi bertutur, dan pengetahuan lokal yang dapat dikembangkan menjadi kamus, bahan ajar, buku cerita anak dwibahasa, bahan pengayaan literasi, serta berbagai produk kebahasaan dan kesastraan lainnya. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang yang semakin luas untuk mendiseminasikan produk-produk tersebut kepada masyarakat melalui platform digital sehingga jangkauan layanan menjadi lebih luas dan merata. Di sisi lain, pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Sulawesi Tenggara juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan produk kebahasaan dan kesastraan oleh masyarakat, terbatasnya sinergi program lintas sektor, perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan transformasi digital layanan kebahasaan, serta pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tantangan tersebut perlu dijawab melalui perencanaan strategis yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029 yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, permasalahan, serta karakteristik pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara semakin efektif dalam mendukung peningkatan kecakapan literasi, pemertabatan bahasa Indonesia,

pelestarian bahasa dan sastra daerah, pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tata kelola organisasi guna mendukung terwujudnya pembangunan pendidikan yang bermutu dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2020—2024

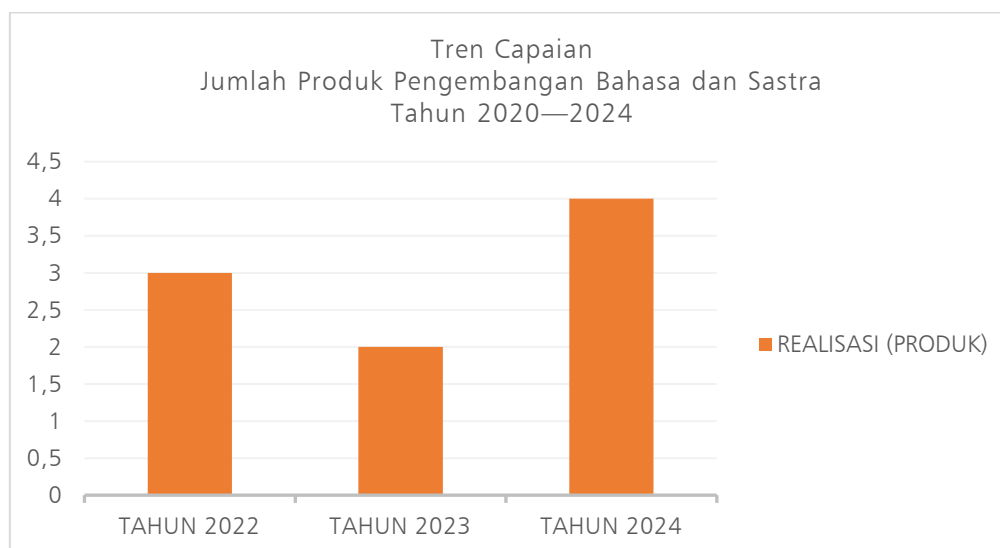
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya bernama Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2020—2024 menetapkan tujuh sasaran kegiatan, yaitu

- 1) Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan;
- 3) Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan;
- 4) Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA;
- 5) Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa;
- 6) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- 7) Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut ini uraian capaian sasaran kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020—2024 yang tertuang dalam target dan capaian tiap indikator kinerja kegiatan untuk mengetahui ketercapaiannya.

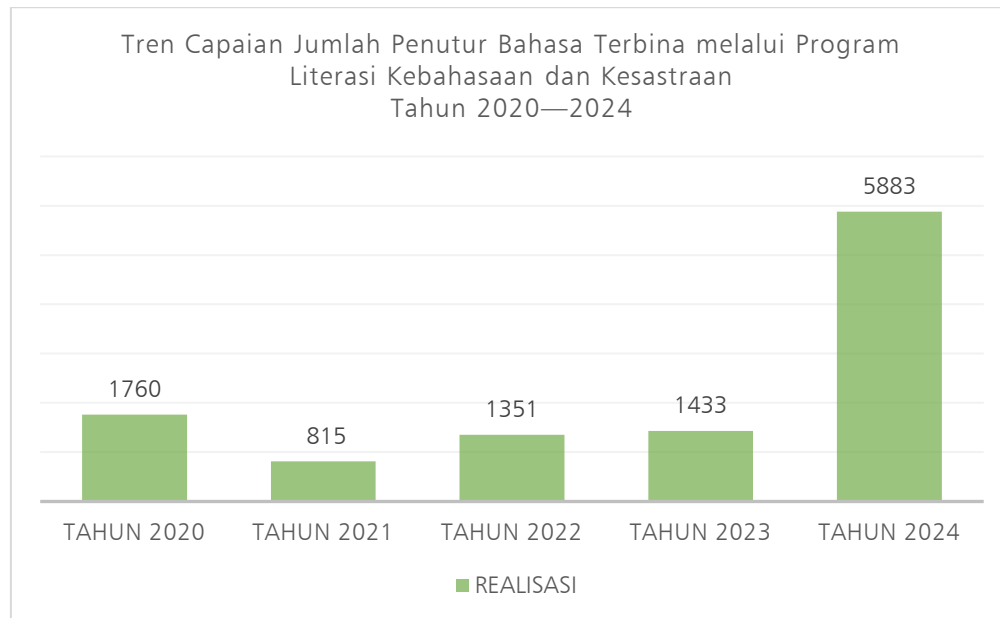
SK 1**Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Sasaran kegiatan pertama *Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra* diukur melalui IKK Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang dihasilkan melalui produk kumpulan kosakata bahasa daerah dan produk kamus bahasa daerah. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian IKK adalah (a) pemerkayaan kosakata berdasarkan pengambilan data inventarisasi kosakata bahasa daerah, dan (b) pengembangan kamus yang dihasilkan berdasarkan penyusunan kamus hasil inventarisasi kosakata. Melalui aktifitas tersebut sampai dengan tahun 2024 dihasilkan 9 produk.

**SK 2****Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan**

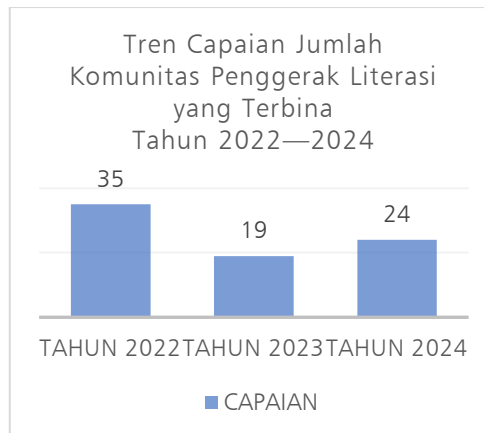
Sasaran kegiatan kedua *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan* diukur melalui IKK Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina Melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian IKK ini adalah penutur bahasa yang ikut serta dalam kegiatan pembinaan, antara lain (a) peningkatan kemahiran

berbahasa; (b) peningkatan apresiasi sastra; (c) sosialisasi dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia; dan (d) pembinaan literasi generasi muda. Melalui aktivitas tersebut, sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 11.269 orang.



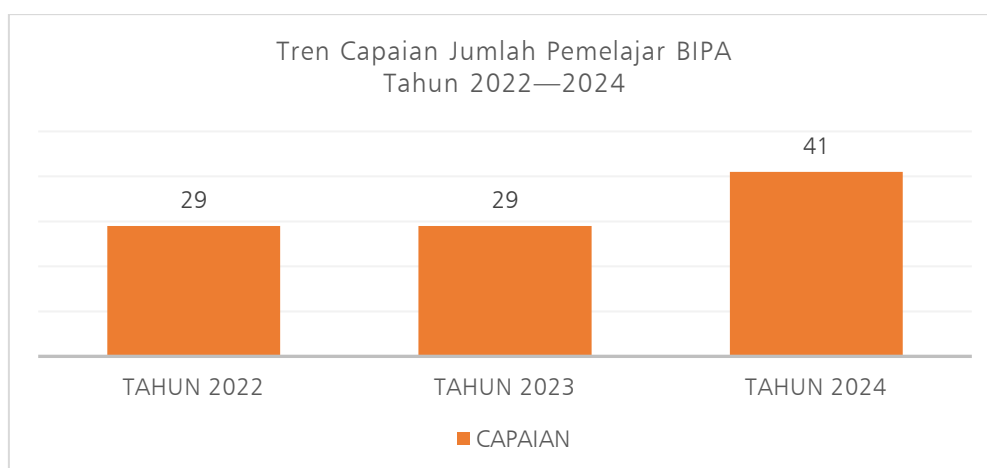
SK 3 Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

Pencapaian SK *Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan* diukur melalui IKK Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya dan Jumlah Komunitas Penggerak Literasi yang Terbina. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian IKK Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya adalah pendampingan terhadap 45 lembaga binaan yang terdiri atas 20 lembaga pendidikan, 15 lembaga pemerintah, dan 10 lembaga swasta. Sedangkan IKK Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina aktivitas yang telah dilakukan sampai tahun 2024 adalah pembinaan terhadap 78 lembaga komunitas yang terdata dalam pemutakhiran profil komunitas.



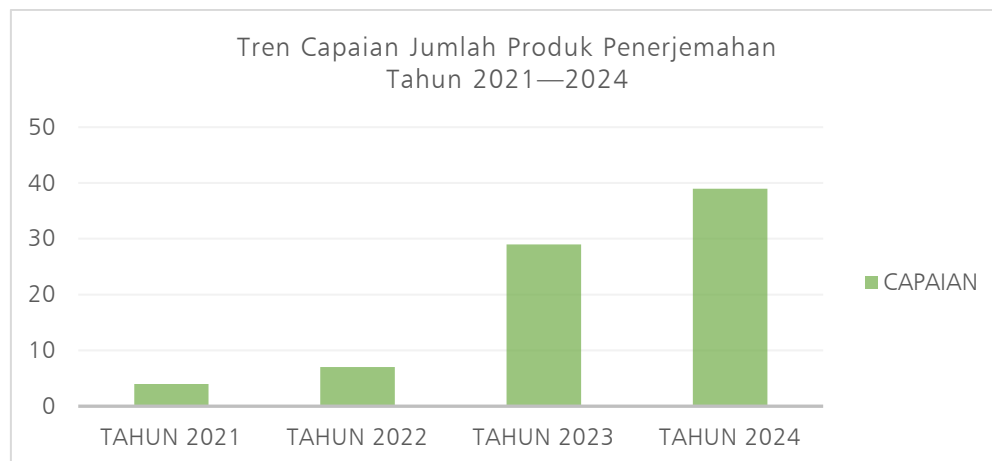
SK 4 Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA

Pencapaian SK *Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA* diukur melalui IKK Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian IKK ini adalah pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA. Melalui aktivitas tersebut, sampai dengan tahun 2024 telah diperoleh 99 pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) melalui pembinaan kepada beberapa lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA di Sulawesi Tenggara.



SK 5 Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa

Pencapaian SK *Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa* diukur melalui IKK Jumlah Produk Penerjemahan. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian IKK ini adalah kegiatan penerjemahan dalam rangka menghasilkan produk penerjemahan sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mendukung program penginternasionalan bahasa Indonesia serta kegiatan literasi. Pada tahun 2024 produk yang telah dihasilkan berjumlah 79 produk buku cerita anak yang dibuat dalam dua versi yaitu cetak dan elektronik.



SK 7 Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Pencapaian SK *Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara* diukur melalui: (a) IKK Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan minimal BB. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja pada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 masuk dalam kategori A (nilai 88,85). Hal ini menunjukkan bahwa pemerolehan predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. (b) IKK *Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor*

Bahasa Sulawesi Tenggara minimal 91, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 96,49. Hal ini menunjukkan bahwa pemerolehan nilai kinerja anggaran telah melampaui target berdasarkan capaian IKPA dan EKA tahun 2024.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada periode 2020—2024 telah dilaksanakan dengan baik dan menorehkan catatan positif. Berbagai capaian menunjukkan keberhasilan di semua program prioritas. Namun, luasnya cakupan pembangunan kebahasaan masih memerlukan penanganan serius secara masif dan berdampak nyata. Oleh sebab itu, perlu dianalisis berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ke depan. Berikut ini identifikasi dan analisis berbagai faktor tersebut.

1.2.1. Kekuatan

- a) Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap;
- b) Lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Sulawesi Tenggara;
- c) SDM memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat;
- d) Tingginya jumlah pengguna KBBI;
- e) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA;
- f) Tersedianya tenaga penerjemah dan ahli bahasa;
- g) Tersedianya sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia;
- h) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai.

1.2.2. Kelemahan

- a) Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi;
- b) Jumlah SDM yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan;
- c) Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat;
- d) Belum semua produk dan layanan kebahasaan termanfaatkan dalam mendukung peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia;
- e) Kurang lengkapnya data bahasa dan sastra daerah;
- f) Belum adanya evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah;
- g) Kurangnya bahan ajar bahasa daerah sebagai penunjang dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah;
- h) Belum disahkannya peta jalan pembudayaan literasi yang mengintegrasikan program literasi di berbagai instansi.

1.2.3. Peluang

- a) Dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Sulawesi Tenggara;
- b) Kesadaran publik akan kelestarian bahasa daerah;
- c) Banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan ahli bahasa;
- d) Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang siap dan terbuka bagi semua kalangan;
- e) Banyak masyarakat atau penulis yang antusias mengikuti sayembara penulisan buku pengayaan literasi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f) Peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang terseleksi sebagai duta bahasa dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra;

- g) Integrasi kebahasaan dan kesastraan melalui pendidikan formal, antara lain pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di satuan pendidikan.

1.2.4. Tantangan

- a) Ancaman kepunahan bahasa daerah;
- b) Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara memberikan dampak negatif pada keberagaman budaya dan penggunaan bahasa;
- c) Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- d) Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa dan sastra;
- e) Berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2024, kompetensi literasi membaca siswa di Indonesia belum merata;
- f) Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia di Sulawesi Tenggara belum terlihat;
- g) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk kodifikasi;
- h) Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami;
- i) Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebahasaan dan kesastraan pada masa mendatang, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

- 1) Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara memberikan dampak negatif pada keberagaman budaya dan penggunaan bahasa.
- 2) Masih rendahnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat.

- 3) Masih rendahnya siswa yang dapat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dalam Asesmen Nasional.
- 4) Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- 5) Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan komunitas baca dan literasi yang ada di Sulawesi Tenggara.
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengutamaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional.
- 7) Terdapat beberapa bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang terancam punah (Statistik Kebahasaan 2024).
- 8) Maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di tengah masyarakat.
- 9) Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.

Permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan menyusun berbagai strategi yang relevan. Strategi diterapkan sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Peningkatan budaya literasi

Literasi berkembang lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dari perspektif itu, peningkatan budaya literasi ditujukan pada peningkatan minat baca, kemampuan memahami bacaan, dan kemahiran berbahasa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditempuh upaya berikut ini.

- 1) Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa warga negara Indonesia, termasuk guru dan siswa;
- 2) Menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi, baik di sekolah keluarga, maupun masyarakat;

- 3) Mengoptimalkan produk dan layanan kebahasaan untuk mendukung budaya literasi;
- 4) Menyediakan buku bermutu, murah, dan merata;
- 5) Membudayakan berpikir kritis.

b) Pengutamaan bahasa negara

Pengutamaan bahasa negara wajib dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. Upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Melibatkan publik (termasuk swasta) dalam perumusan kebijakan pengutamaan bahasa negara;
- 2) Mendorong pemerintah daerah dan legislatif agar mengeluarkan regulasi pengelolaan bahasa di Sulawesi Tenggara.

c) Pelindungan bahasa daerah

Sejumlah 9 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang sudah terpetakan dan beberapa lagi masih dalam tahap kajian, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak berada di ambang kepunahan bahasa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan kajian vitalitas bahasa daerah Sulawesi Tenggara;
- 2) Pendampingan terhadap pemerintah daerah tentang pelindungan bahasa daerah;
- 3) Penerbitan regulasi berupa peraturan daerah terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025—2029 mengacu pada Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dirumuskan sebagai berikut.

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemartabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan visi sebagai berikut.

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra.

Visi ini merupakan hasil perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional bidang kebahasaan yang akan

mengedepankan gotong-royong guna mencapai kedaulatan bahasa, bangga, mahir, maju, dan pendidikan untuk semua berdasarkan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan visi Presiden Republik Indonesia.

2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kedaulatan bahasa, dan tata kelola pendidikan serta mengacu pada misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan;
- 2) Mewujudkan kemartabatan bahasa Indonesia;
- 3) Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah;
- 4) Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan
- 5) Mewujudkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH)

2.3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut diturunkan dari Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2029). Indikator kinerja tujuan yang ditetapkan diturunkan dari indikator kinerja tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

2.3.1. Tujuan Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai berikut.

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Keberhasilan 2029
Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	55,87
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	A

Tabel 1 | Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2.3.2. Tujuan Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Keberhasilan 2029
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	80

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Keberhasilan 2029
Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	84,52
	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	51,60
	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,89
	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah	57,29
	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan	57
	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	60
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik
	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	AA

Tabel 2 | Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

2.4. Sasaran

2.4.1. Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan mengampu tiga sasaran yang ditetapkan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjaraan						
IKSS 2.2	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	Persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
SS 3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan						
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90,00	90,10	90,20	90,30

Tabel 3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	68	72	76	80
SP 3	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persen	48,13	49,45	50,15	50,73	51,60
IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persen	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	Persen	55	55,5	56	56,5	57
IKP 3.2.2	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persen	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA

Tabel 4 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2.4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan sasaran kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Adapun sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan indikator kinerja yang merupakan bagian dari indikator kinerja kegiatan unit eselon-2 yang ada di lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Rumusan indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

- [IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
- [IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya
- [IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
- [IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan
- [IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
- [IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)
- [IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara
- [IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara

Rincian keterkaitan antara sasaran kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara minimal A

Tabel 5 | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

2.5. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan/sasaran. Manajemen risiko yang ditetapkan mencakup sasaran kegiatan, indikasi, penanganan atau rencana mitigasi, pemilik, dan pengelola risiko.

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Rencana Mitigasi	Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Rendahnya partisipasi atau capaian literasi peserta didik akibat keterbatasan waktu, sarana, dan partisipasi sekolah	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk menyusun jadwal kegiatan, optimalisasi media pembelajaran, monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Produk penerjemahan belum terdistribusi satuan pendidikan sasaran	Koordinasi dengan pemda/dinas pendidikan dan sekolah sasaran untuk memastikan seluruh produk diterima dan dimanfaatkan	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Rendahnya minat peserta mengikuti pembinaan bahasa Indonesia	Sosialisasi, koordinasi dengan pemda/satuan pendidikan, metode pembelajaran yang interaktif	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Koneksi internet tidak memadai saat pelaksanaan UKBI Adaptif	Menyiapkan koneksi internet cadangan, uji coba perangkat, dukungan teknis	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Partisipasi lembaga/komunitas belum optimal	Penguatan koordinasi dan publikasi, kemitraan strategis	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Komitmen tindak lanjut dari lembaga yang rendah	Pendampingan dan pemantauan lembaga sasaran	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kualitas naskah atau produk belum memenuhi standar	Telaah dan reviu berjenjang	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pengembangan
5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Keterbatasan narasumber atau penutur ahli	Koordinasi dengan pemda/satuan pendidikan dan lembaga adat	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pelindungan
		Rendahnya partisipasi penutur dalam pelindungan bahasa daerah		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pelindungan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Rencana Mitigasi	Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Minimnya lembaga penyelenggara BIPA yang terfasilitasi	Pemetaan kebutuhan dan koordinasi	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pengembangan
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	Keterlambatan pelaporan dan administrasi	Monitoring berkala, pemanfaatan aplikasi	Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum
		Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi	Penguatan pengendalian internal dan revidu berkala	Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum

Tabel 6 | Manajemen Risiko Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- b) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

- c) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- d) Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
- e) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- 1) Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
- 2) Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
- 3) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
- 4) Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
- 6) Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia
- 7) Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Pendidikan
- 8) Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Kementerian

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

-  Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan

- a) Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
- b) Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
- c) Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan

- a) Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b) Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
- c) Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
- d) Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

- e) Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitas pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

 Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian

- a) Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b) Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c) Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen, berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025—2029.

3.3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditujukan pada empat fokus utama, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

a) Peningkatan Kecakapan Literasi

Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup

manusia. Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Untuk meningkatkan kecakapan literasi, Badan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Bahasa bermitra dengan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem persekolahan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi di ranah sekolah merupakan kontribusi langsung Badan Bahasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh pelosok negeri. Capaian utama yang diharapkan ialah meningkatnya hasil belajar para peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan berbagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu

1. Akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi
2. Kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan akses dilaksanakan melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi. Dalam hal ini, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Produk-produk tersebut berupa, antara lain, buku bacaan bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braile), komik, karya sastra yang dialihwahanakan, produk penerjemahan antarbahasa, dan kamus pelajar. Secara berkala buku bermutu dicetak dan disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi rendah dalam asesmen nasional. Selain dalam bentuk cetak,

produk-produk tersebut dapat diakses melalui beberapa portal yang dimiliki Badan Bahasa, misalnya budi.kemendikdasmen.go.id dan penjaring.kemendikdasmen.go.id. Semua produk dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca tulis anak Indonesia.

Salah satu prioritas penting dalam rencana strategis 2025—2029 ialah dukungan Badan Bahasa terhadap pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi pendekatan Kemendikdasmen agar pengembangan peserta didik dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*). Badan Bahasa dapat menyediakan beragam media pembelajaran literasi yang dapat mendorong eksplorasi peserta didik melalui peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra. Media pembelajaran yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dapat dimodifikasi menjadi buku besar (*big book*) yang dapat dibaca bersama di kelas, buku permainan kata, buku yang diselingi dengan audio atau musik, dan sebagainya. Media tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga tercipta pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan menggembirakan.

Sementara itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pembinaan kecakapan literasi dengan sasaran jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran pembinaan diarahkan pada dua unsur, yaitu SDM pendidikan dan satuan pendidikan. SDM pendidikan (pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan) merupakan sasaran prioritas pembinaan yang diharapkan secara akumulatif mampu meningkatkan kecakapan literasi para peserta didik. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai pintu masuk penguatan literasi. Selain terhadap SDM pendidikan, pembinaan juga dilaksanakan

dengan objek satuan pendidikan. Pembinaan untuk satuan pendidikan ini diarahkan pada dua aspek, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik dan penggunaan bahasa pada dokumen di lingkungan sekolah. Bahasa di ruang publik dan di dokumen sekolah merupakan media ajar otentik yang dilihat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi contoh baik yang dapat langsung diajarkan kepada peserta didik.

Guna mendukung pembelajaran mendalam, pembinaan terhadap SDM pendidikan juga dapat dimodifikasi, antara lain, dalam bentuk lomba-lomba untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dan sejenisnya dapat menumbuhkan keberanian berekspresi, kecakapan menggunakan bahasa, dan berpikir kritis/logis. Lomba-lomba tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para peserta didik sehingga diharapkan meninggalkan jejak positif dalam pengembangan diri mereka.

Peningkatan Kecakapan Literasi

Akses

Penyediaan

- Buku bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braille, komik)
- Karya sastra yang dialihwahanakan
- Kamus dan produk kodifikasi bagi pelajar
- Produk penerjemahan lintas bahasa

Modifikasi/inovasi:

- Buku besar (*big book*), buku teka teki, buku musik

Kompetensi

Pembinaan

SDM Pendidikan

- Pendidik
- Peserta didik
- Tenaga kependidikan

Satuan Pendidikan

- Ruang publik
- Dokumen (laporan, persuratan, naskah dinas)

(jenjang SD, SMP, dan SMA)

Modifikasi/inovasi:

- Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dsb.

Pembelajaran Mendalam

(Berkesadaran, Bermakna, Menyenangkan)

b) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dilaksanakan melalui penguatan berbagai program kebahasaan dengan sasaran utama masyarakat umum di luar jalur pendidikan. Pemartabatan tersebut bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang tercermin dari tiga aspek, yaitu kognitif (ide/pemikiran), afektif (mental/rasa), dan konatif (perbuatan). Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.

Terdapat dua tonggak penting dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

Peraturan Mendikdasmen dan SE Mendagri melengkapi dan memperkuat upaya pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, terutama di daerah. Dengan hadirnya dua ketentuan tersebut, pemerintah daerah di seluruh provinsi memiliki acuan yang kuat untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di

daerah masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai/Kantor Bahasa untuk bersama-sama memartabatkan bahasa dan sastra Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen dan SE Mendagri tersebut, Balai/Kantor Bahasa di daerah melaksanakan konsolidasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari konsolidasi tersebut dihasilkan SK tentang tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan berbagai perangkat di daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai/Kantor Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memartabatkan bahasa Indonesia di daerah akan menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana strategis ini.

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia



c) Pelestarian Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa dan sastra daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan daya hidup bahasa dan sastra daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Hal itu

dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa atau sastra punah, dunia kehilangan sejumlah besar pengetahuan berharga, termasuk kearifan lokal, yang terhimpun dari generasi ke generasi.

Saat ini ihwal bahasa daerah bukan semata urusan lokal dan berorientasi masa lalu. Kepundahan bahasa daerah sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. UNESCO telah menetapkan tahun 2022 sampai 2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah sebagai seruan kepada seluruh negara di dunia untuk berpartisipasi melindungi bahasa daerah di wilayah masing-masing. Isu bahasa daerah sedemikian penting karena berkaitan dengan hak asasi berbahasa (*linguistic rights*) yang melekat pada setiap individu.

Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa melakukan berbagai aktivitas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, mulai dari pemetaan bahasa, sastra, dan aksara, revitalisasi, konservasi, dan lain-lain. Pendekatan dengan melibatkan banyak pihak atau partisipasi semesta menjadi prioritas agar upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah lebih optimal, efektif, dan efisien.



d) Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan usaha yang bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berjati diri teguh dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dilakukan upaya diplomasi kebahasaan sebagai bentuk diplomasi lunak yang bertujuan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global, dalam hal ini, meningkatkan pemahaman dan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan pengaruh Indonesia, bangsa Indonesia, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam peradaban dunia.

Pelaksanaan diplomasi kebahasaan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global ditempuh melalui penyebaran bahasa Indonesia serta penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis. Penyebaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai intervensi, antara lain, (1) pengembangan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan di luar negeri, (3) pengembangan kerja sama internasional kebahasaan dan kesastraan, serta (4) fasilitasi penggunaan bahasa Indonesia dalam forum dan lembaga internasional. Sementara itu, penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis dilaksanakan melalui berbagai aksi, antara lain, (1) fasilitasi penguasaan bahasa asing untuk mendukung diplomasi kebahasaan, (2) fasilitasi penguasaan bahasa asing bagi warga

negara Indonesia untuk tujuan strategis, (3) penerjemahan karya sastra, dokumen, dan buku bernilai strategis, serta (4) penjurubahasaan dalam forum internasional strategis.

Sejalan dengan penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pelaksanaan diplomasi kebahasaan melalui penyebaran bahasa Indonesia berorientasi pada peningkatan fungsi (daya guna dan daya pajan) bahasa Indonesia dalam konteks global, yakni dalam berbagai ranah penggunaan atau komunikasi global dan di berbagai kawasan internasional dengan menggunakan pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi dalam aksi penginternasionalan bahasa Indonesia tersebut meliputi (1) pendekatan pendidikan melalui dimensi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, riset, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendekatan politik melalui dimensi politik dalam negeri dan luar negeri; (3) pendekatan ekonomi melalui dimensi investasi, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan; (4) pendekatan sosial dan budaya melalui dimensi kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan, dan media; (5) pendekatan pertahanan dan keamanan melalui dimensi pertahanan dan dimensi keamanan; serta (6) pendekatan keagamaan melalui dimensi pendidikan keagamaan dan dimensi peribadatan.

Sesuai dengan lini masa dalam Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pada periode tahun 2025—2029, kegiatan penginternasionalan bahasa Indonesia berada pada tahap fondasi. Pada tahap tersebut, intervensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa difokuskan pada penguatan regulasi operasional dan tata kelola kelembagaan serta koordinasi dan fasilitasi berkelanjutan guna menunjang penguatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penerjemahan dan penjurubahasaan, peningkatan kemahiran berbahasa asing untuk

mendukung diplomasi kebahasaan, serta pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan.



3.3.2. Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan dua program teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu (a) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dan (b) Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan, Badan Bahasa menerapkan strategi pelaksanaan program melalui pemberdayaan dua jalur penugasan, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Secara struktural, program dilaksanakan melalui penjabaran sasaran dan target dari Kepala Badan kepada kepala pusat hingga kepala bidang. Secara fungsional, program dilaksanakan melalui pemfokusan kepakaran dan layanan

kebahasaan. Pemberdayaan dua jalur tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi. Program melalui jalur struktural dan fungsional dilaksanakan di seluruh provinsi di bawah kendali para kepala unit pelaksana teknis di daerah.

Strategi pelaksanaan program melalui jalur struktural dilaksanakan dengan mengoptimalkan struktur kelembagaan yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan dibantu Kepala Pusat melaksanakan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepala Pusat dibantu Kepala Bidang menjalankan tiga tugas khusus bidang kebahasaan, yaitu

- a) Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra;
- b) Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi; dan
- c) Bidang Kemitraan dan Diplomasi Bahasa.

Kepala Pusat	Kepala Bidang	Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra	Kepala Balai/Kantor Bahasa
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Peningkatan dan Penguatan Literasi	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Kemitraan dan Diplomasi Bahasa	

Tabel 7 | Strategi Pelaksanaan Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Badan Bahasa. Berdasarkan kepakaran tersebut, para pegawai dikelompokkan ke dalam lima tim kerja di tingkat pusat dan tiga tim kerja di tingkat UPT yaitu

- a) Tim Kerja di tingkat pusat terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan;
 - 2) Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
 - 3) Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 - 4) Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum;
 - 5) Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; dan
 - 6) Tim Kerja Penerjemahan.
- b) Tim Kerja di tingkat UPT terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Pengembangan;
 - 2) Tim Kerja Pelindungan; dan
 - 3) Tim Kerja Pembinaan

Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	Tim Kerja Pusat	Tim Kerja UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Tim Kerja Pengembangan
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tim Kerja Pembinaan
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Penerjemahan	

Tabel 8 | Koordinasi Pelaksanaan Program Tim Kerja Pusat dan UPT

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

3.4.1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, kebijakan penanganan terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.

Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembangunan bahasa dan kesastraan diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditujukan pada empat fokus utama, yaitu

- a. peningkatan kecakapan literasi;
- b. pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia;
- c. pelestarian bahasa daerah; dan
- d. penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia.

Peningkatan Kecakapan Literasi

Peningkatan kecakapan literasi adalah upaya meningkatkan kemampuan peserta didik dan masyarakat dalam memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi melalui peningkatan kemahiran berbahasa, pembiasaan membaca, dan apresiasi bahasa dan sastra guna mendukung pembelajaran, berpikir kritis, dan pembentukan karakter. Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, Balai Bahasa Provinsi

Sulawesi Tenggara menetapkan arah kebijakan peningkatan kecakapan literasi yang berorientasi pada penguatan kemampuan membaca, bernalar kritis, dan apresiasi sastra melalui sinergi antara satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan arah kebijakan ini melalui pembinaan literasi di satuan pendidikan, penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dan penyediaan dan pemanfaatan produk kebahasaan dan kesastraan. Pembinaan literasi di satuan pendidikan diwujudkan melalui upaya penguatan kompetensi literasi peserta didik dalam kegiatan pengembangan budaya baca dan apresiasi sastra serta kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terdapat kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga satuan pendidikan. Sedangkan pemanfaatan produk kebahasaan dan kesastraan mencakup produk pengayaan pendukung literasi yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya karya sastra yang dialihwahkan, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Pada pembinaan bahasa dan sastra, terdapat kegiatan peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia, peningkatan apresiasi sastra, dan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga.

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan

digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga. Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.

Pelestarian Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka melestarikan bahasa daerah adalah revitalisasi. Output aktivitas ini adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi penutur muda akan pentingnya bahasa daerah. Revitalisasi dianggap sebagai sebuah langkah strategis dalam rangka membangkitkan kembali penggunaan bahasa daerah dalam ranah kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga merupakan upaya untuk melestarikan sekaligus mempromosikan bahasa. Selain melibatkan penutur muda, kegiatan ini tentu saja akan melibatkan pemangku kepentingan di daerah, misalnya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, dan lain-lain untuk mendukung tercapainya aktivitas tersebut.

Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran

bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

3.4.2. Strategi Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan strategi pelaksanaan program sesuai dengan strategi pelaksanaan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu melalui pemberdayaan dua jalur penugasan, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Program melalui jalur struktural dan fungsional dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi di bawah kendali kepala balai/kantor bahasa.

Strategi pelaksanaan program melalui jalur struktural dilaksanakan dengan mengoptimalkan struktur kelembagaan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan tenaga administrasi dalam melaksanakan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kepakaran. Pegawai dikelompokkan ke dalam tiga tim kerja, yaitu

1. Tim Kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra;
2. Tim Kerja Perlindungan Bahasa dan Sastra; dan
3. Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Tim Kerja	Tim Kerja Kepakaran	Pusat
Tim Kerja Pengembangan	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Tim Kerja Pelindungan	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Tim Kerja Pembinaan	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
	Tim Kerja Literasi	
	Tim Kerja Penerjemahan	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra

Tabel 9 | Strategis Pelaksanaan Program Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa regulasi yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan program sebagai berikut.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring		
2	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.	Sekretariat Badan Bahasa	Tahun 2026
3	Rancangan Peraturan Presiden	Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tahun 2026
4	Rancangan Peraturan Presiden	Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tahun 2027
5	Rancangan Peraturan Presiden	Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tahun 2026

Tabel 10 | Kerangka Regulasi

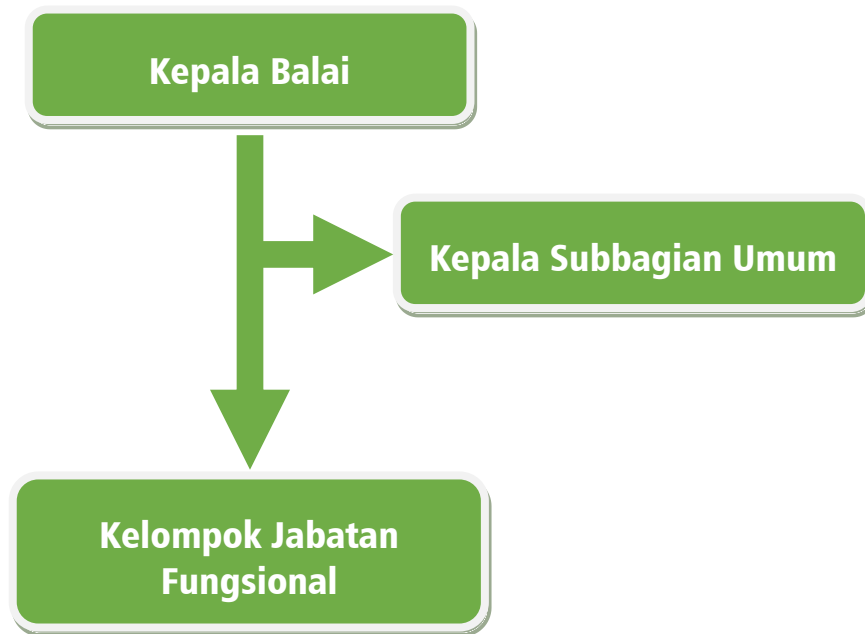
3.6. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan dukungan kelembagaan. Kelembagaan yang jelas akan memudahkan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

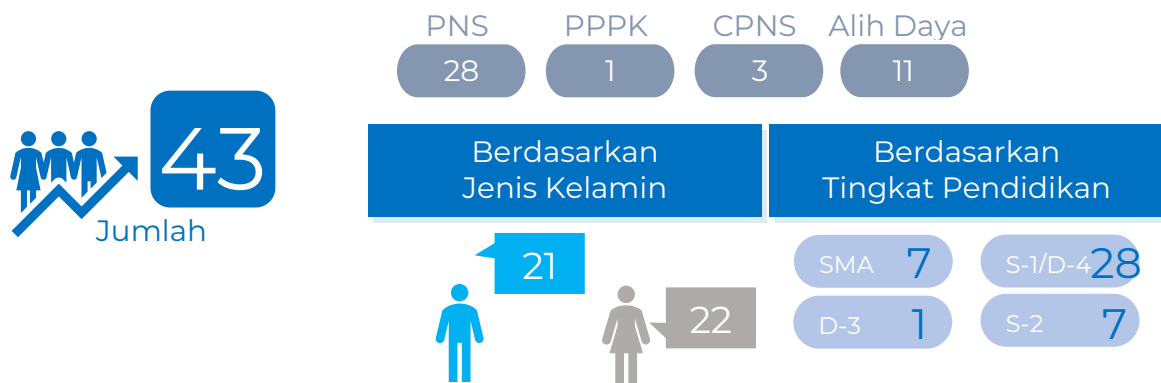
3.6.1. Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara seperti pada bagan organisasi berikut.



3.6.2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sebanyak 32 orang pegawai ASN. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural eselon III sebanyak 1 orang, eselon IV sebanyak 1 orang, pejabat fungsional tertentu sebanyak 15 orang, dan fungsional umum (pelaksana) sebanyak 15 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 orang, dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang. Selain itu, SDM Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara juga ditunjang oleh tenaga alih daya sebanyak 11 orang yang terdiri atas tenaga administrasi 1 orang, tenaga keamanan sebanyak 4 orang, tenaga supir sebanyak 1 orang, tenaga kebersihan sebanyak 4 orang, dan tenaga resepsionis 1 orang.



3.6.3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025—2029 di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies and soft competencies*), maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi

serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Cita ke-7 tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025—2029 menekankan dua dimensi utama.

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam area perubahan, yakni

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

b. Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada wilayah ZI menuju WBK/WBBM. Penataan dan Penguatan Organisasi.

c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN.

f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diperlukan untuk dapat membangun Public Trust terhadap penyelenggara pelayanan publik.

3.6.4. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini telah memiliki gedung kantor yang terdiri atas gedung utama, aula, musala, dan pos satpam. Gedung tersebut dibangun di atas tanah milik pemerintah pusat (c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Tanah tersebut diperoleh dari hibah pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 10.000 m². Gedung Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dibangun pada tahun 2006 dan tahun 2024 telah dilakukan renovasi pelafond dan atap gedung utama. Seiring bertambahnya usia bangunan, material bangunan telah mengalami degradasi alami sehingga memerlukan renovasi lantai pada gedung utama dan renovasi lantai, atap, dan plafon pada gedung aula, musala, dan pos satpam. Selanjutnya, untuk mencerminkan citra satuan kerja yang lebih modern dan profesional, halaman kantor juga perlu dilakukan renovasi sebagai pendukung kebutuhan fungsional pegawai.

Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung dengan kendaraan operasional dan kendaraan fungsional berupa 2 unit kendaraan operasional roda 4, jenis Toyota Inova Reborn 2.400cc tahun 2025 dan Daihatsu Terios dengan kapasitas mesin 1.500cc tahun 2015.

Adapun rencana pengembangan sarana dan prasarana pada periode Renstra 2025—2029 sebagai berikut.

No.	Rencana Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1	Pemeliharaan prasarana gedung (aula, musala, dan pos jaga)	2026—2029
2	Pemeliharaan prasarana gedung utama	2026
3	Pemeliharaan halaman (penimbunan halaman)	2026—2028
4	Pemasangan paving blok halaman kantor	2026—2028
5	Pengadaan inventaris kantor	2025—2029
6	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	2029

Tabel 11 | Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	68	72	76	80
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24	30	36	42	48
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41	43	45	47	49
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	63	66	69	72
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	63,13	66,34	69,54	72,75
IKK 3.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Persen	50	55	60	65	70

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76
SK 5	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30
SK 6	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55	55,5	56	56,5	57
SK 7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara						
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara minimal A	Predikat	A	A	A	A	AA

Tabel 11 | Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan

hal itu, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik					
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	1.327.573	1.371.744	1.414.268	1.458.110	1.503.312
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	603.090	622.389	642.305	662.859	684.071
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia					
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	424.087	437.234	450.788	464.762	479.170
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan					
IKK 3.1	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	167.999	207.816	214.258	220.900	227.748
IKK 3.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	180.000	185.580	191.333	197.264	203.379
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra					
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	233.176	240.404	247.857	255.541	263.462
SK 5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra					
IKK 5.1	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	102.360	155.155	159.965	164.924	170.036
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1.212.323	1.249.905	1.288.652	1.328.600	1.369.787
SK 6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA					
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara					
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	3.877.507	3.612.423	3.724.409	3.839.866	3.958.901
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara minimal A	3.413.423	3.519.239	3.628.336	3.740.814	3.856.779

Tabel 12 | Kerangka Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.371.612	2.219.429	2.288.853	2.360.450	2.434.288
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	1.371.612	2.219.429	2.288.853	2.360.450	2.434.288
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	3.308.624	3.717.368	3.832.607	3.951.418	4.073.909
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	1.314.683	1.405.060	1.448.617	1.493.524	1.539.823
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	1.925.456	2.241.700	2.311.193	2.382.840	2.456.706
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
WA	Program Dukungan Manajemen	4.499.402	4.253.597	4.385.459	4.521.409	4.661.571
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.499.402	4.253.597	4.385.459	4.521.409	4.661.571

Tabel 13 | Kerangka Pendanaan Berdasarkan Program/Kegiatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025—2029 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 dan (2) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5889/I/BS.01.02/2025 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029.

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (dalam ribuan)					Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik												
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	68	72	76	80	1.327.573	1.371.744	1.414.268	1.458.110	1.503.312	Tim Kerja Pembinaan
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24	30	36	42	48	603.090	622.389	642.305	662.859	684.071	Tim Kerja Pembinaan
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia												
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41	43	45	47	49	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977	Tim Kerja Pembinaan
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	63	66	69	72	424.087	437.234	450.788	464.762	479.170	Tim Kerja Pembinaan
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan												
IKK 3.1	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	63,13	66,34	69,54	72,75	167.999	207.816	214.258	220.900	227.748	Tim Kerja Pembinaan
IKK 3.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Persen	50	55	60	65	70	180.000	185.580	191.333	197.264	203.379	Tim Kerja Pembinaan
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra												
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76	233.176	240.404	247.857	255.541	263.462	Tim Kerja Pengembang-an

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (dalam ribuan)					Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 5	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra												
IKK 5.1	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8	102.360	155.155	159.965	164.924	170.036	Tim Kerja Pelindungan
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30	1.212.323	1.249.905	1.288.652	1.328.600	1.369.787	Tim Kerja Pelindungan
SK 6	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA												
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55	55,5	56	56,5	57	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380	Tim Kerja Pengembang-an
SK 7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara												
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	3.877.507	3.612.423	3.724.409	3.839.866	3.958.901	Subbagian Umum
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara minimal A	Predikat	A	A	A	A	AA	3.413.423	3.519.239	3.628.336	3.740.814	3.856.779	Subbagian Umum

DEFINISI OPERASIONAL
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025—2029

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Peserta didik diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran peserta didik yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah peserta didik di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Peserta didik tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh peserta didik akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca peserta didik. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta didik yang dinilai.	Jumlah peserta didik yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%. $PPDM = \frac{\Sigma \text{PDML}}{\Sigma \text{SPDI}} \times 100\%$ Keterangan: PPDM = Persentase Peserta didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya PDML = Jumlah Peserta didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi embacanya SPDI = Jumlah Peserta didik yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Literasi
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau mitra kerja sama pemerintah, atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi. $PBu = \frac{Jpt}{JTpt} \times 100\%$ Keterangan: Pbu = Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt = Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt = Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Penerjemahan

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional. Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.	Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif. $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ Keterangan: PPT = Persentase penutur teruji PSS = Jumlah penutur teruji yang sesuai predikat PSP = Jumlah total penutur teruji	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja UKBI
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari. Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan. Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan.	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$ Keterangan: PPB = Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PM = Jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya PT = jumlah penutur bahasa terbina Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.		
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen. Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan. Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PLT = \frac{LM}{LT} \times 100\%$ Keterangan: PLT = Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya LM = Jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = Jumlah lembaga terbina Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A. Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.	Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100% . $PKL = \frac{KLM}{SKLT} \times 100\%$ Keterangan: PKL = Persentase Komunitas Literasi yang Meningkat Kinerjanya ΣKLM = Komunitas Literasi yang Meningkat Kinerjanya. $\Sigma SKLT$ = Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa. Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	Laporan Internal Data Pokok Kebahasaan Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Literasi
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia. Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi – elaborasi – verifikasi – validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan – penyelarasan – penyuntingan – penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPP = \frac{PB}{PA} \times 100\%$ Keterangan: PPP = Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PB = Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PA = Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja KI

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara.	Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$ Keterangan: PPB = Persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan x = Penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara n = Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonumulatif	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat.	Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta. Satuan: Rasio Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi.	Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%). Rumus penghitungan indikator sebagai berikut. $PL = \frac{l}{n} \times 100\%$	Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan Penanggung Jawab: Tim Kerja BIPA

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Keterangan: PL = Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA l = Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n = Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	Kinerja Anggaran dalam PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK No. 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator - Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) - Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.	Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%] Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: Nilai Kinerja >90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kurang <50% Sangat Kurang Satuan: Nilai Tipe Penghitungan: Non Kumulatif	Hasil perhitungan pada aplikasi OM-SPAN Penanggung Jawab: Pejabat Perbendaharaan
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Sulawesi Tenggara minimal A	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] Nilai predikat interpretasi > 90-100 AA Sangat Memuaskan > 80-90 A Memuaskan > 70-80 BB Sangat Baik > 60-70 B Baik	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen Penanggung Jawab: Tim SAKIP

SK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>).	> 50-60 CC Cukup > 30-50 C Kurang 0-30 D Sangat Kurang Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	

CASCADING RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2025—2029

Kode										Program/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Startegis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Satuan	Target Semula					Pelaksana	Rasionalisasi Perubahan	
Program	SS	IKSS	SP	IKP	Kegiatan	SK	IKK	KRO	RO			2025	2026	2027	2028	2029			
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran																		
	SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan																	
		IKSS	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen																
			SP	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus,															
				IKP 2.1.1	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca					Persentase	64	68	72	76	80				
					7569	Peningkatan Kecakapan Literasi													
						SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik												
							IKK 2.1.1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca			Persentase	64	68	72	76	80	Pusbin dan UPT		
								7569.BMA	Data dan Informasi Publik										
									7569.BMA.003	Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Dokumen	413	620	620	620	620	Pusbin		
									7569.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat									
									7569.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	18.290	-	-	-	-	Pusbin dan UPT		
									7569.QDC.004	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	orang		21.000	23.250	25.500	25.500	UPT		
									7569.QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan									
									7569.QGC.001	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Lembaga		750	750	750	750	Pusbin dan UPT		
							IKK 2.1.1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik			Persentase	19	23	29	35	41	Pusdaya dan UPT	Tidak hanya dimanfaatkan di sekolah, tetapi juga di lembaga lainnya (TBM, Perpustakaan) serta dimanfaatkan melalui platform digital.	
								7569.QMA	Data dan Informasi Publik										
									7569.QMA.003	Produk Penerjemahan	Dokumen	2310	2310	2310	2310	2310	Pusdaya dan UPT	tetap	
							IKK 2.1.1.3	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik			Persentase	12,96	26,30	40,37	54,81	70,00	Pusbanglin		
								7569.QMA	Data dan Informasi Publik										
									7569.QMA.001	Karya Sastra yang Dialih-Wahanakan	Dokumen	50	50	50	50	50	Pusbanglin dan UPT		
									7569.QMA	Data dan Informasi Publik									
									7569.QMA.004	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar	Dokumen	2	32	33	33	33	Pusbanglin dan UPT		
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan																		
	SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan																	
		IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan									Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01		
			SP	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia															
				IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia					Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52				
					7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia													
						SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia												
							IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya		Persentase	41	43	45	47	49	Pusbin dan UPT			
								7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										
									7567.QDC.002	Penutur Bahasa Teruji	Orang	186.569	188.432	190.315	192.223	194.143	Pusbin dan UPT		
									7567.BMA	Data dan Informasi Publik									
									7567.BMA.001	Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun	Dokumen	7	7	7	7	7	Pusbin		
							IKK 3.1.1.3	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya				60	63	66	69	72	Pusbin dan UPT		
								7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										
									7567.QDC.001	Penutur Bahasa Terbina	Orang	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250	UPT		
									7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat									
									7567.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	-	17.975	17.975	17.975	17.975	Pusbin dan UPT		
								7567.PEG	Konferensi dan Event										

Kode										Program/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Startegis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Satuan	Target Semula					Pelaksana	Rasionalisasi Perubahan			
Program	SS	IKSS	SP	IKP	Kegiatan	SK	IKK	KRO	RO			2025	2026	2027	2028	2029					
									7567.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	115	124	124	124	124	Pusbin dan UPT				
				IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra						Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6					
					7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia															
						SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan														
							IKK 3.1.2.1	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya					Persentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754	Pusbin dan UPT		
								7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
								7567.BDB.001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan					Lembaga	1.545	750	750	750	750	UPT	
							IKK 3.1.2.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya					Persentase	50	55	60	65	70	Pusbin dan UPT		
								7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
								7567.BDB.002	Komunitas Penggerak Literasi Terbina					Lembaga	1179	1179	1179	1179	1179	UPT	
								7567.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
								7567.QDD.001	Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi					mpok Massyar	100	100	100	100	100	Pusbin	
								7567.QDD.002	Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi					mpok Massyar	100	100	100	100	100	Pusbin	
				IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni						Persentase	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89					
						SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra														
							IKK 3.1.3.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sasta yang Tervalidasi					Persentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76	Pusbanglin dan UPT		
								7567.QMA	Data dan Informasi Publik												
								7566.QMA.003	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan					Dokumen	32	32	32	32	32	Pusbanglin dan UPT	
								7567.QMA	Data dan Informasi Publik												
								7566.QMA.004	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa					Dokumen	81	82	82	83	83	Pusbanglin dan UPT	
						7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah														
				IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)						Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29					
						7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah														
						SK	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra														
							IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan					Persentase	2,8	8,5	10,7	15	21,4	Pusbanglin		
								Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan					Persentase						UPT		
								7566.QMA	Data dan Informasi Publik												
								7566.QMA.002	Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra						33	33	33	33	33	UPT	
							IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas					Rasio	1:18	1:20	1:23	1:25	1:30	UPT		
								7566.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
								7566.QDD.001	Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan)					Komunitas/p erseorangan	30	30	35	40	50	Pusbanglin	
								7566.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
								7566.QDC.001	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah					Orang	7.741	7.817	7.931	8.007	8.077	UPT	
								7566.PEG	Konferensi dan Event												
								7566.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah					Kegiatan	32	32	32	32	32	Pusbanglin dan UPT	
				IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa						Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87					
				SP	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia																
					IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan						Persentase	55	55,5	56	56,5	57				
						7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia														
						SK	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA														
							IKK 3.2.1.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luas Negeri)					Persentase	25	25,5	26	26,5	27	Pusdaya		
								Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)					Persentase	50	55,5	56	56,5	57	UPT	Target tahun pertama seharusnya 55 sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan	
								7568.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
								7568.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)					Lembaga	387	387	418	449	480	Pusdaya dan UPT	
								7568.PEG	Konferensi dan Event												
								7568.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan					Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusdaya	
								7568.BMA	Data dan Informasi Publik												

Kode										Program/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Startegis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Satuan	Target Semula					Pelaksana	Rasionalisasi Perubahan				
Program	SS	IKSS	SP	IKP	Kegiatan	SK	IKK	KRO	RO			2025	2026	2027	2028	2029						
									7568.BMA.003	Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Dokumen	7	7	7	7	7	Pusdaya	Orientasi Jenis Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA yang dikembangkan oleh Pusdaya yang berjumlah 4, yaitu: 1) Bahan Ajar 2) Bahan Tes, 3) Bahan Siaran, dan 4) Bahan Alih Wahana				
				IKP 3.2.2	Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan						Persentase	20	30	40	50	60		Mengikuti rasionalisasi pemanfaatan dalam IPBI dengan nilai maksimum 20% dan data base berkurang menjadi hanya lembaga multilateral yang berafiliasi dengan Kemlu tidak menyertakan lembaga BIPA				
					7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia																
						SK	Meningkatnya pemanfaatan bahan diplomasi kebahasaan di forum internasional															
							IKK 3.2.2.1	Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional					Persentase	22	28	45	77	100	Pusdaya	Nilai maksimum bahan yang dimanfaatkan adalah 50% ,ditetapkan karena tidak semua bahan relevan untuk semua forum internasional serta terbatasnya peluang pemanfaatan sesuai tema dan konteks forum. Target ini bersifat realistis dan menjaga mutu publikasi.		
								7568.BMA	Data dan Informasi Publik													
									7568.BMA.002	Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan)	Dokumen	25	32	38	44	50	Pusdaya	Tetap				
									7568.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
									7568.BDC.001	Sastrawan Berkarya di Mancanegara	orang	2	5	5	8	10	Pusdaya	Tetap				
WA	Program Dukungan Manajemen																					
	SS	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas																				
		IKSS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian										Indeks									
			SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah																		
				IKP 4.1.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										Katagori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
					7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa																
						SK	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa															
							IKK 3.1.1.1	Persentase Satuan Kerja di badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik					Persentase	95	96	97	98	99	Eselon I			
								7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
									7613.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	34	34	34	34	34		Seluruh Satker				
									7613.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	34	34	34	34	34		Seluruh Satker				
								7613.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
									7613.EBB.951	Layanan sarana Internal	Unit	3	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00						
									7613.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	1	25.578,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00		Sumut, Sumbar, NTT, Riau				
								7613.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
									7613.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	1.195	1195	1195	1195	1195						
								7613.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
									7613.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	9	9	9	9		Sekretariat				
									7613.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	7	7	7	7	7		Sekretariat				
									7613.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	272	272	272	272	272		seluruh satker				
									7613.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	0	1	1	1	1		Sekretariat				
									7613.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	36	36	36	36	36		Sekretariat				
				IKP 4.1.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa										Predikat	A	A	A	A	AA		

Kode										Program/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Startegis/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Satuan	Target Semula					Pelaksana	Rasionalisasi Perubahan			
Program	SS	IKSS	SP	IKP	Kegiatan	SK	IKK	KRO	RO			2025	2026	2027	2028	2029					
					7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa															
						SK	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa														
							IKK 3.1.1.1	Peningkatan mutu layanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A					Persentase	100	100	100	100	100	Eselon I		
							7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
								7613.EBA.956	Layanan BMN					Layanan	59	59	59	59	59	Seluruh satker	
								7613.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					Layanan	42	42	42	42	42	Sekretariat	
								7613.EBA.959	Layanan Protokol					Layanan	1	1	1	1	1	Sekretariat	
								7613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	34	34	34	34	34	Sekretariat	
								7613.EBA.962	Layanan Umum					Layanan	34	34	34	34	34	Seluruh satker	
								7613.EBA.963	Layanan Data dan Informasi					Layanan	34	34	34	34	34	Sekretariat	
								7613.EBA.994	Layanan Perkantoran					Layanan	34	34	34	34	34	Sekretariat	